



**Laporan Kinerja Triwulan 3
Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat selama triwulan 3 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 3	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik				
[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	64	Persen	0	0
[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	19	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia				
[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	41	Persen	0	30
[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	60	Persen	25	0
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan				
[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	59,93	Persen	0	0
[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya	50	Persen	27	0
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra				
[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	11,55	Persen	0	0
[SK 5] Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra				
[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	2,8	Persen	1	0
[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	1:18	Rasio	0	0
[SK 6] Meningkatnya fasilitas terhadap lembaga penyelenggara program BIPA				



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW ₃	Realisasi
[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	50	Persen	10	0
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat				
[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat	Sangat Baik	Kategori	-	63,04
[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan 3 Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan yang mendukung [IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca adalah pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Cerdas Mengulas Buku bagi Siswa Sekolah Dasar, Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Membaca Cepat bagi Siswa SMP, dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Membaca Kritis dan Analitis Bagi Siswa SMA. Berikut deskripsi pelaksanaan tiga kegiatan tersebut.

1. Bimbingan Teknis Cerdas Mengulas Buku bagi Siswa Sekolah Dasar

Kegiatan Bimbingan Teknis Cerdas Mengulas Buku bagi Siswa SD dilaksanakan pada 28 Juli 2025 di SDN 2 Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 siswa, 10 guru, dan 4 pengawas dari sekolah kategori K1 dan K2. Pada hari pertama, peserta menjalani tes awal untuk mengukur kemampuan literasi sebelum menerima materi inti mengenai teknik mengulas buku. Narasumber memperkenalkan unsur-unsur penting dalam sebuah buku, seperti judul, penulis, ilustrator, tokoh, latar, hingga isi cerita, serta mengarahkan siswa untuk menyampaikan pendapat mereka terhadap bacaan. Dalam pelaksanaannya, narasumber menekankan peran krusial guru pendamping karena jumlah peserta yang cukup besar dan keterbatasan waktu membuat pendampingan menjadi sangat penting.

Pada 29 Juli 2025, kegiatan berlanjut dengan melibatkan kelompok siswa dari sekolah lain di Kecamatan Bayan, sehingga total peserta mencapai 200 orang. Materi yang diberikan tetap sama dengan hari pertama, tetapi difokuskan pada pendalaman keterampilan mengulas buku serta memperkuat kemampuan siswa dalam menyampaikan hasil bacaan secara lisan maupun tulisan. Peserta juga didorong untuk melanjutkan latihan secara mandiri selama dua minggu berikutnya, sehingga kemampuan mereka semakin terbiasa terasah. Karena keterbatasan ruang dan agar lebih mudah dijangkau seluruh peserta, panitia membagi pelaksanaan Bimtek menjadi dua hari dengan jumlah peserta yang dibagi rata. Dengan dukungan guru, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya membaca sekaligus meningkatkan kualitas literasi siswa secara berkelanjutan.

Tahap berikutnya dilaksanakan pada 11 Agustus 2025, berupa evaluasi internal terhadap hasil pelaksanaan Bimtek. Evaluasi dihadiri oleh panitia, narasumber, pendamping kecamatan, serta 20 guru pendamping dari sekolah peserta. Dalam pertemuan tersebut, guru menyampaikan laporan perkembangan siswa yang dinilai cukup signifikan, terutama dalam hal pemahaman bacaan dan keterampilan mengulas isi buku. Narasumber menegaskan bahwa penilaian akhir akan dilakukan pada pekan keempat untuk melihat sejauh mana peningkatan hasil belajar siswa setelah mengikuti serangkaian kegiatan. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan strategi agar program literasi serupa dapat berjalan lebih efektif pada



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

pelaksanaan berikutnya.

2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Membaca Cepat bagi Siswa SMP

Pada 30 Juli 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB menggelar Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Membaca Cepat untuk siswa SMP di Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula SKB ini melibatkan 100 siswa dari SMP negeri bersama guru pendamping dan pengawas, khususnya dari 20 sekolah yang nilai asesmen literasinya tergolong rendah. Kepala Balai Bahasa, Dwi Pratiwi, hadir menyapa dan memberi motivasi agar para peserta tidak hanya membaca cepat, tetapi juga mampu memahami makna bacaan secara mendalam. Dalam sambutannya juga disebut bahwa kegiatan serupa sebelumnya telah sukses diterapkan di siswa SD, sehingga diharapkan semangat dan antusiasme serupa muncul di jenjang SMP. Dua narasumber inti, yaitu Sunarti dan Irma Setiawan, memberikan materi teknik membaca cepat dan membaca pindai, serta praktik langsung agar siswa dan guru pendamping dapat menerapkan metode tersebut di sekolah masing-masing.

Kegiatan kembali dilanjutkan pada 31 Juli 2025 dengan melibatkan 100 siswa dari SMP swasta sebagai peserta. Meskipun materi inti sama seperti hari pertama, fokus pertemuan lebih menitikberatkan pada latihan intensif membaca cepat, pembiasaan teknik, dan penguatan pemahaman melalui evaluasi singkat. Selain sesi tatap muka, peserta juga diberi tugas pembelajaran mandiri untuk dijalankan selama dua minggu ke depan sebagai bentuk pengukuran berkelanjutan terhadap keterampilan membaca cepat mereka. Dengan dukungan dan pendampingan guru, program ini diharapkan akan memicu peningkatan signifikan dalam kemampuan literasi siswa SMP di Kabupaten Lombok Tengah dan menjadi model bagi pelaksanaan literasi di daerah lain.

Pada tanggal 8 September 2025, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan penguatan pasca-Bimbingan Teknis Membaca Cepat yang bertempat di Aula Kabupaten Lombok Tengah dengan melibatkan 20 guru dari 20 SMP, pendamping satuan pendidikan, serta perwakilan Dinas Pendidikan, yang dilaksanakan dengan cara diskusi, laporan progres praktik mandiri membaca cepat, identifikasi hambatan, serta penyusunan strategi tindak lanjut guna meningkatkan kompetensi literasi membaca siswa secara berkelanjutan.

3. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Membaca Kritis dan Analitis Bagi Siswa SMA

Pada tanggal 1 Agustus 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Membaca Kritis dan Analitis bagi Siswa SMA di Kota Mataram. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Wijaya Kusuma, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diikuti oleh 100 siswa beserta guru pendamping dan pengawas sekolah yang berasal dari sekolah dengan capaian literasi rendah. Narasumber, yaitu Dr. Johan Mahyudi, M.Pd., dan Ahmad Junaidi, M.A., Ph.D., menyampaikan materi teknik membaca kritis serta strategi memahami bacaan secara mendalam, disertai praktik langsung untuk mengasah keterampilan siswa.

Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Membaca Kritis dan Analitis berlanjut di Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 2 Agustus 2025 dengan jumlah peserta 100 siswa beserta guru pendamping. Kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gerung ini masih menyampaikan materi yang diberikan sama oleh narasumber yang sama dengan hari sebelumnya, namun lebih difokuskan pada pendalaman praktik membaca analitis, penguatan keterampilan menyusun ringkasan, serta latihan berpikir kritis dalam menanggapi isi bacaan. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi guru untuk mengadopsi metode pembelajaran literasi yang lebih aplikatif di kelas.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tatap muka, Balai Bahasa Provinsi NTB melaksanakan pendampingan daring melalui Zoom Meeting selama lima minggu, yaitu pada tanggal 9, 16, 23, 30 Agustus, dan 6 September 2025. Dalam setiap sesi, narasumber memberikan penguatan materi yang telah disesuaikan dengan petunjuk teknis serta menugaskan latihan mandiri kepada peserta. Pendampingan ini dimaksudkan agar siswa dan guru dapat mempraktikkan keterampilan membaca kritis dan analitis secara berkesinambungan sekaligus memantau progres.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Balai Bahasa Provinsi NTB mengadakan evaluasi akhir Bimbingan Teknis Membaca Kritis dan Analitis secara daring melalui Zoom Meeting pada tanggal 15 September 2025.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Evaluasi ini dihadiri oleh narasumber, panitia, serta guru pendamping dari sekolah peserta. Seluruh peserta diwajibkan mengisi tes akhir dan formulir evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan. Dalam laporan yang disampaikan, guru menyatakan bahwa siswa mengalami peningkatan signifikan dalam pemahaman bacaan dan keterampilan analisis teks. Narasumber menegaskan pentingnya keberlanjutan program literasi ini serta perlunya penguatan strategi pembelajaran agar keterampilan membaca kritis dapat terus berkembang di sekolah.

Kendala/Permasalahan

Kendala dalam pencapaian target kegiatan dalam IKK ini sebagai berikut.

1. Jumlah peserta yang cukup banyak membuat pendampingan tidak bisa dilakukan secara intensif pada setiap siswa.
2. Sebagian siswa masih kesulitan menyampaikan pendapat tertulis karena kemampuan literasi dasar yang beragam
3. Beberapa siswa kesulitan menjaga konsentrasi ketika berlatih membaca cepat dalam durasi yang cukup panjang.
4. Fasilitas ruang dan ketersediaan bahan bacaan terbatas, sehingga siswa tidak bisa berlatih dengan variasi teks yang banyak.
5. Materi membaca kritis dan analitis masih dianggap sulit oleh sebagian siswa sehingga membutuhkan bimbingan lebih intensif.
6. Pelaksanaan pendampingan daring terkendala jaringan internet yang tidak merata di beberapa wilayah serta tidak semua peserta bisa hadir pada setiap sesi.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian target sebagai berikut.

1. Guru pendamping diberdayakan untuk mendampingi kelompok kecil siswa agar pendampingan lebih merata.
2. Narasumber memberikan contoh ulasan sederhana dan bertahap untuk membiasakan siswa dalam menulis pendapat terhadap bacaan.
3. Narasumber menggunakan metode permainan literasi dan latihan bertahap agar siswa tetap fokus dan tidak cepat jenuh.
4. Panitia dibantu guru pendamping menyiapkan bahan bacaan digital/lembar tambahan sehingga siswa memiliki lebih banyak variasi teks untuk berlatih.
5. Narasumber memberikan contoh analisis bacaan dengan pendekatan kontekstual yang dekat dengan pengalaman siswa.
6. Panitia dibantu guru pendamping menyediakan materi dan lembar kerja mandiri agar siswa tetap bisa mengikuti meskipun terkendala jaringan.

[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Progress/Kegiatan

Selama Triwulan 3 Tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan dua kegiatan utama yang mendukung pencapaian [IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik. Pada Triwulan III, kegiatan dalam RO Produk Penerjemahan mencakup tahapan pembayaran jasa ilustrator tahap kedua sebesar 80% dari total nilai kontrak, menandai progres signifikan dalam penyelesaian ilustrasi buku cerita anak dwibahasa. Selain itu, telah dilakukan pencetakan terhadap 18 naskah cerita yang sebelumnya dinyatakan lolos penilaian oleh Pusat Perbukuan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5001/I/PR.06.00/2025. Naskah-naskah tersebut merupakan bagian



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

dari daftar judul buku yang akan dicetak dan dikirim sebagai dukungan terhadap Program Literasi bagi Balai dan Kantor Bahasa Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi capaian penting dalam penguatan literasi berbasis terjemahan dan pelestarian bahasa daerah.

Selanjutnya dilaksanakan Kegiatan Uji Keterbacaan dilaksanakan di SDN 1 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 21 September 2023. Sebanyak 30 siswa kelas awal dan 3 guru pendamping terlibat aktif dalam kegiatan ini. Tim Balai Bahasa NTB menguji 2 judul buku cerita anak dwibahasa, yaitu **“Si Ulu dan Si Ulu-Ulu”** serta **“Si Bulu dan Si Bulu-Bulu”**, yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan Sasak. Siswa membaca buku secara mandiri dan bersama, lalu memberikan tanggapan terhadap isi cerita dan ilustrasi. Guru menyampaikan bahwa buku tersebut menarik dan sesuai dengan konteks lokal, namun beberapa bagian perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami anak-anak.

Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Sumbawa Barat berlangsung pada 26 September 2023 di SDN 1 Taliwang. Kegiatan ini melibatkan 35 siswa dan 4 guru pendamping. Buku yang diuji berjudul **“Si Lalu dan Si Lalu-Lalu”**, ditulis dalam bahasa Indonesia dan Sumbawa. Proses uji keterbacaan dilakukan melalui pembacaan bersama, diskusi terbimbing, dan pengisian lembar evaluasi. Anak-anak menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap cerita dan ilustrasi, sementara guru memberikan masukan terkait struktur kalimat dan kosakata yang perlu disesuaikan dengan tingkat literasi siswa. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengembangan literasi anak berbasis kearifan lokal dan pelestarian bahasa daerah, serta menjadi dasar penyempurnaan buku sebelum didistribusikan secara luas ke sekolah-sekolah di NTB.

Kendala/Permasalahan

Kendala yang terjadi dalam pencapaian target IKK ini sebagai berikut.

1. Variasi kemampuan literasi siswa: Perbedaan tingkat pemahaman dan kemampuan membaca antar siswa memengaruhi kelancaran proses uji keterbacaan.
2. Keterbatasan waktu di sekolah: Jadwal kegiatan belajar mengajar yang padat membuat pelaksanaan uji keterbacaan harus disesuaikan agar tidak mengganggu proses pembelajaran utama.
3. Kebutuhan penyederhanaan isi: Beberapa bagian cerita dinilai terlalu kompleks oleh guru dan siswa, sehingga perlu revisi agar lebih sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
4. Pendistribusian buku 18 naskah yang sudah dicetak masih belum dilakukan karena masih menunggu 3 naskah yang mengalami penyesuaian sesuai dengan ketentuan nomenklatur dan juknis pencetakan terbaru.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian target sebagai berikut.

1. Guru diberikan panduan untuk menyesuaikan metode pembacaan dan diskusi sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa, sehingga proses uji keterbacaan tetap inklusif dan efektif.
2. Koordinasi dengan pihak sekolah dilakukan lebih awal agar pelaksanaan tidak mengganggu proses belajar mengajar utama.
3. Melakukan revisi terhadap struktur kalimat, kosakata, dan alur cerita berdasarkan hasil evaluasi guru dan siswa. Proses ini melibatkan editor bahasa dan ilustrator agar hasil akhir tetap menarik dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
4. Koordinasi intensif dengan Pusat Perbukuan terkait penyesuaian 3 naskah yang masih menunggu revisi nomenklatur dan juknis. Setelah penyesuaian selesai, pencetakan dan pengiriman 18 naskah akan segera dilanjutkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5002/I/Pr.06.00/2025 Tentang Penerima Pengiriman Buku Terjemahan Pendukung Program Literasi bagi Balai dan Kantor Bahasa Tahun Anggaran 2025.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia

[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya

Progress/Kegiatan

Progres capaian sampai dengan triwulan tiga untuk [IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya adalah sebesar **7.225 orang**. IKK ini memiliki capaian output sebanyak 8.037 orang yang mengikuti UKBI selama tahun 2025. Sementara itu jumlah peuji yang sesuai predikat sebanyak 2.168 peuji. Berikut ini adalah daftar kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja UKBI dari bulan Juli sampai dengan September 2025.

1. Pada 15 Juli 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB melaksanakan pendampingan UKBI di **SMAN 4 Sumbawa** serta koordinasi dengan **Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa**; kegiatan meliputi sosialisasi mekanisme pendaftaran, praktik registrasi akun UKBI, dan simulasi soal untuk meningkatkan kesiapan peserta. Kegiatan ditujukan kepada guru kelas V SD, guru Bahasa Indonesia tingkat SMP, serta siswa SMA setempat; pelaksana merupakan Tim Kerja UKBI Balai Bahasa NTB bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa.
2. Pada 16 Juli 2025, kegiatan UKBI berlanjut di SMPN 1 Sumbawa Besar dengan peserta sekitar **150 siswa** kelas IX. Tim UKBI Balai Bahasa NTB yang terdiri atas Hartanto, Desi Rachmawati, dan Toni Samsul Hidayat memberikan materi mengenai manfaat UKBI, tata cara pendaftaran, dan teknik menjawab soal. Siswa juga diberi kesempatan melakukan simulasi langsung sebagai latihan sebelum mengikuti uji sesungguhnya.
3. Pada 17 Juli 2025, Tim UKBI menysasar Gugus 1 Kecamatan Labuhan Badas yang terdiri dari **14 sekolah dasar**, serta siswa di SMPN 1 Sumbawa dan SMAN 1 Sumbawa. Guru SD memperoleh sosialisasi manfaat UKBI dan praktik registrasi, sedangkan siswa SMP dan SMA mengikuti arahan teknis tentang sistem ujian adaptif. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Balai Bahasa NTB, Dwi Pratiwi, yang memberikan sambutan kebahasaan, sementara Hartanto memberikan penjelasan teknis terkait pendaftaran akun.
4. Pada 18 Juli 2025, kegiatan dilaksanakan di SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat, yang diikuti oleh **340 siswa dan 40 guru**. Kegiatan ini berupa sosialisasi manfaat UKBI dan pengujian adaptif langsung menggunakan perangkat digital. Tim UKBI Balai Bahasa NTB yang dipimpin oleh Hartanto memandu jalannya kegiatan, didukung oleh mahasiswa magang dari UIN Malang, serta guru sekolah yang mendampingi para siswa.
5. Selanjutnya, pada 21–22 Juli 2025, pelaksanaan UKBI dilakukan di Kabupaten Lombok Timur dengan menysasar Universitas Hamzanwadi, SMAN 1 Sakra, MAN IC, dan SMAN 2 Selong. Pada hari pertama, sekitar **50 mahasiswa** Universitas Hamzanwadi mengikuti sosialisasi, praktik pendaftaran akun, serta simulasi soal UKBI. Hari berikutnya, siswa SMA dan MA mengikuti ujian adaptif yang dipandu oleh Tim UKBI Balai Bahasa NTB, yaitu Desi Rachmawati, I Nyoman Cahyasabudhi, dan Hartanto, yang memberikan materi teknis serta penjelasan manfaat UKBI.
6. Pada 31 Juli 2025, Balai Bahasa NTB menerima kunjungan edukatif dari SD Lenterahati sebanyak **40 siswa dan 4 guru** di Aula Cilinaya, Balai Bahasa NTB Mataram. Dalam kegiatan ini, siswa dikenalkan dengan peran Balai Bahasa serta instrumen UKBI sebagai sarana untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia sejak dini. Materi disampaikan oleh Tim UKBI, salah satunya Desi Rachmawati, dengan tujuan menanamkan kesadaran kebahasaan kepada siswa sekolah dasar.
7. Pada 11–12 Agustus 2025, Balai Bahasa NTB menyelenggarakan kegiatan UKBI bagi **80 orang** pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang berlangsung di Aula Mandalika, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi NTB. Kegiatan ini diikuti oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru bahasa Indonesia dari jenjang SD hingga SMA, serta perwakilan sekolah swasta. Acara dibuka oleh Kepala Balai Bahasa NTB, Dwi Pratiwi, serta dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTB dan narasumber dari Dinas Komunikasi serta Kepala SMPN 15 Mataram. Selama dua hari, peserta mendapatkan sosialisasi manfaat UKBI, pendampingan teknis, serta kesempatan mengikuti uji adaptif.
8. Pada 20–21 Agustus 2025, Balai Bahasa NTB melaksanakan pendampingan UKBI Adaptif di Kabupaten Lombok Tengah dengan lokasi di SMAN 1 Jonggat, MAN 1 Lombok Tengah, SMAN 1 Praya, dan SMAN 4 Praya. Pada hari pertama, sekitar **1.300 siswa** dari SMAN 1 Jonggat dan **100 siswa** dari MAN 1 mengikuti ujian adaptif, sementara hari kedua berlanjut ke sekolah menengah lainnya. Tim



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

UKBI yang dipimpin Hartanto memberikan bimbingan teknis, menjelaskan manfaat instrumen UKBI, serta mendampingi siswa dalam proses registrasi hingga simulasi soal.

9. Pada 26 Agustus 2025, kegiatan pendampingan UKBI Adaptif dilakukan di SDN Model Mataram dengan melibatkan sekitar **100 siswa** kelas IV–VI. Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi, di mana siswa diperkenalkan dengan konsep UKBI, diajak memahami manfaatnya, dan didampingi dalam praktik pendaftaran akun ujian. Ketua Tim UKBI, Hartanto, memandu kegiatan sekaligus memberikan materi motivasi tentang pentingnya literasi kebahasaan.
10. Pada 27 Agustus 2025, Tim UKBI melaksanakan pendampingan di SMPN 7 Mataram yang diikuti oleh **1.438 siswa** kelas VII hingga IX. Karena jumlah peserta yang besar, tim dibagi menjadi beberapa kelompok pendamping, yakni Hartanto, Desi Rachmawati, Fauzan, Arya, Baiq Ayu Candra, dan Wahyudi. Setiap kelompok memberikan sosialisasi tentang manfaat UKBI, mendampingi proses pendaftaran akun, serta memberi arahan strategi menjawab soal agar siswa lebih siap menghadapi ujian adaptif.
11. Pada 3 September 2025, Balai Bahasa NTB melaksanakan pendampingan UKBI Adaptif di **tiga sekolah** di Kota Mataram, yaitu SMA IT Anak Sholeh, SMP IT Anak Sholeh, dan SDN 14 Cakranegara. Kegiatan ini diikuti oleh siswa dan guru, dengan materi yang mencakup pengenalan manfaat UKBI, prosedur pendaftaran, hingga strategi menjawab soal. Hartanto selaku Ketua Tim Kerja UKBI hadir memimpin kegiatan dan memastikan seluruh peserta mendapatkan pendampingan yang maksimal.
12. Pada 11 September 2025, pendampingan UKBI dilakukan di SDN 2 Cakranegara, Mataram, dengan melibatkan **321 siswa** kelas V. Kegiatan ini diawali dengan sambutan kepala sekolah, dilanjutkan pemaparan materi oleh Hartanto yang menjelaskan bentuk soal UKBI dan teknik menjawabnya. Para siswa dibimbing untuk memahami struktur ujian serta dilatih agar lebih percaya diri mengikuti tes adaptif.
13. Pada 11–12 September 2025, kegiatan UKBI Adaptif dilaksanakan di SMPN 7 Mataram dengan peserta siswa kelas VII dan IX. Selama dua hari, siswa mendapatkan arahan teknis terkait pendaftaran, penggunaan sistem ujian adaptif, serta praktik simulasi menjawab soal. Dua tim Balai Bahasa NTB diturunkan, masing-masing dipimpin oleh Safoan Abdul Hamid dan Hartanto, untuk memastikan seluruh peserta dapat mengikuti ujian dengan baik.
14. Pada 15 September 2025, Balai Bahasa NTB menyelenggarakan pendampingan UKBI di SMAN 1 Mataram yang diikuti oleh **1.400 siswa** kelas X, XI, dan XII. Peserta dibagi menjadi tiga sesi sesuai tingkat kelas. Dalam kegiatan ini, Desi Rachmawati dan I Nyoman Cahyasabudhi memberikan arahan teknis mengenai pendaftaran akun serta penggunaan sistem ujian, sementara Hartanto memberikan materi tentang bentuk soal, teknik menjawab, dan penguasaan dasar kebahasaan seperti ejaan dan tanda baca.
15. Pada 17 September 2025, Balai Bahasa NTB menjadi tuan rumah uji coba soal UKBI yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Kegiatan ini diikuti oleh **50 peserta** dari berbagai kalangan, antara lain pelajar, guru, wartawan, hingga warga asing. Acara dibuka oleh Atikah selaku Widyabasa Ahli Madya, dan teknis materi disampaikan oleh narasumber pusat, termasuk Azizah. Uji coba ini meliputi empat seksi, yakni Mendengarkan, Merespons Kaidah, Membaca, dan Menulis, dengan tujuan memperbarui kualitas instrumen soal UKBI.

Kendala/Permasalahan

Kendala dalam pencapaian target sebagai berikut.

1. Tingginya jumlah peserta di beberapa sekolah (misalnya lebih dari 1.000 siswa dalam satu sekolah) sehingga membutuhkan pembagian sesi dan pendampingan yang intensif agar semua peserta dapat mengikuti proses dengan lancar.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi di beberapa lokasi, terutama perangkat komputer dan jaringan internet, yang dapat menghambat kelancaran pendaftaran akun maupun pelaksanaan tes adaptif.
3. Rendahnya pemahaman awal peserta mengenai UKBI, baik terkait mekanisme pendaftaran akun maupun bentuk soal, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk sosialisasi sebelum pelaksanaan.
4. Variasi kemampuan literasi peserta, terutama siswa SD dan SMP, sehingga kesiapan dalam memahami instruksi dan mengerjakan soal cukup beragam.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

5. Koordinasi lintas lembaga (sekolah, dinas pendidikan, perguruan tinggi) yang terkadang membutuhkan penyesuaian jadwal dan teknis pelaksanaan agar tidak bertabrakan dengan agenda sekolah lainnya.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian target dalam IKK ini sebagai berikut.

1. Pembagian sesi dan tim pendamping pada sekolah dengan jumlah peserta besar sehingga semua peserta terlayani secara merata tanpa mengurangi kualitas pendampingan.
2. Pemanfaatan sistem UKBI adaptif secara daring yang memungkinkan pengaturan kapasitas peserta sesuai ketersediaan perangkat di lokasi, sehingga kendala sarana dapat diatasi dengan penjadwalan bergilir.
3. Pendampingan teknis intensif sebelum pelaksanaan, berupa sosialisasi, simulasi, serta arahan langsung oleh tim, agar peserta lebih siap dalam memahami alur pendaftaran dan mekanisme tes.
4. Penguatan literasi kebahasaan dasar melalui penekanan pada materi ejaan, tanda baca, dan keterampilan membaca, sebagai bekal peserta menghadapi tes UKBI.
5. Koordinasi aktif dengan sekolah dan dinas pendidikan, baik melalui komunikasi awal maupun pendampingan berjenjang, sehingga pelaksanaan UKBI dapat berjalan sesuai target tanpa mengganggu aktivitas belajar mengajar.

[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia

[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Progress/Kegiatan

Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025, capaian indikator [IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya mencapai 275 orang dari target output sebesar 275 orang. Capaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan Kemahiran Berbahasa Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Pada tanggal 29—30 September 2025 Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sekaligus upaya untuk memperluas sasaran peningkatan kompetensi kebahasaan di kalangan tenaga profesional. Peserta kegiatan terdiri atas 81 orang, yang mencakup guru non-Bahasa Indonesia dari berbagai jenjang, staf persuratan dari instansi pemerintah dan swasta, serta perwakilan media lokal. Kehadiran peserta yang beragam ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemahiran berbahasa tidak hanya difokuskan pada lingkup pendidikan formal, tetapi juga pada sektor kelembagaan dan dunia kerja yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik serta penyebaran informasi.

Dalam kegiatan tersebut, pada hari pertama peserta memperoleh pembekalan mengenai kebijakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk kewajiban penggunaan bahasa negara dalam dokumen resmi lembaga dan komunikasi di ruang publik. Selain itu, peserta juga dibimbing untuk memahami penerapan kaidah kebahasaan dalam praktik sehari-hari, seperti dalam penyusunan surat dinas, pembuatan laporan, serta penulisan berita di media. Materi disampaikan oleh tim Balai Bahasa dengan menekankan pentingnya kesesuaian bahasa dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia, pilihan diksi yang tepat, dan struktur kalimat yang efektif agar pesan yang disampaikan jelas, lugas, dan mudah dipahami. Pada hari kedua, peserta menandatangani lanjutan materi terkait tata naskah dinas, materi penggunaan kecerdasan artifisial (AI) dalam menunjang kinerja organisasi, dan materi tentang UKBI. Dengan melibatkan berbagai kalangan di Lombok Tengah, Balai Bahasa Provinsi NTB berupaya memperkuat penerapan bahasa Indonesia di berbagai ranah kehidupan sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di kalangan profesional dan memperkuat budaya literasi di lingkungan kerja.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pencapaian target sebagai berikut.

1. Keragaman latar belakang peserta yang berasal dari guru non-Bahasa Indonesia, staf persuratan, dan perwakilan media menyebabkan perbedaan tingkat pemahaman awal terkait kaidah bahasa Indonesia. Hal ini membuat proses penyampaian materi perlu disesuaikan agar semua peserta dapat mengikuti dengan baik.
2. Masih ada peserta yang tidak bisa mengikuti kegiatan secara penuh karena ada penugasan yang lebih urgen yang membuat ruang untuk praktik langsung, diskusi, dan pendalaman materi tidak dapat dilakukan secara optimal.
3. Fasilitas pendukung kegiatan seperti akses ke Google Meet masih terkendala, meja, dan kit seminar peserta tidak tersedia, sehingga membatasi peserta untuk terlibat penuh dalam pembelajaran, khususnya pada sesi pengisian tes awal dan tes akhir, latihan menulis, dan telaah dokumen,
4. Kebiasaan peserta dalam penggunaan bahasa sehari-hari yang masih dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing menjadi tantangan tersendiri dalam menanamkan kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian target IKK ini sebagai berikut.

1. Pendekatan diferensiasi materi dilakukan dengan menyesuaikan contoh dan latihan bagi setiap kelompok peserta. Guru lebih difokuskan pada penerapan bahasa Indonesia dalam pembelajaran, staf persuratan diarahkan pada praktik penulisan dokumen resmi, sedangkan media lokal mendapat penekanan pada penggunaan bahasa dalam pemberitaan.
2. Optimalisasi metode interaktif melalui diskusi kelompok, tanya jawab, dan simulasi menulis yang memungkinkan peserta langsung mempraktikkan kaidah bahasa Indonesia dengan bimbingan narasumber.
3. Pemanfaatan bahan yang tercedia dan bahan digital yang diberikan kepada peserta sebagai panduan lanjutan setelah kegiatan selesai, sehingga pembelajaran dapat terus berlanjut secara mandiri.
4. Pemberian motivasi dan penguatan kesadaran kebahasaan dengan menekankan pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan sarana komunikasi resmi, sehingga peserta terdorong untuk menjadi teladan dalam penggunaan bahasa di lingkungan kerja masing-masing.

[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

Progress/Kegiatan

Pada triwulan tiga ini, capaian [IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya adalah 25 lembaga dan telah sampai pada tahap pendampingan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pembinaan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang triwulan 3 ini adalah sebagai berikut.

Pada tanggal 8 Juli 2025 Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan pemantauan awal terhadap penggunaan bahasa negara di ruang publik dan tata naskah dinas pada sejumlah lembaga yang menjadi sasaran program pembinaan tahun 2025. Kegiatan pemantauan ini dilakukan oleh Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Hukum dengan mengunjungi sekolah, kantor pemerintah, dan lembaga swasta untuk mendokumentasikan praktik berbahasa dalam penamaan ruang, papan informasi, serta dokumen surat keluar. Data hasil pemantauan dijadikan dasar penyusunan strategi pendampingan berikutnya.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Beberapa lembaga menyampaikan kesiapan untuk memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang benar, sehingga kegiatan ini menjadi pijakan awal bagi Balai Bahasa dalam merancang sosialisasi dan pembinaan secara kolektif.

Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2025 Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan kegiatan Sosialisasi Kolektif bagi 25 lembaga sasaran yang sebelumnya telah dipantau. Kegiatan dilaksanakan di Balai Bahasa NTB dengan melibatkan sepuluh lembaga pemerintah, dua belas lembaga pendidikan, dan tiga lembaga swasta. Sosialisasi ini membahas temuan hasil pemantauan, seperti penggunaan bahasa asing dalam penamaan lembaga dan kesalahan kaidah dalam tata naskah dinas. Dalam kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman teknis mengenai penulisan dokumen resmi yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lembaga-lembaga sasaran juga menyatakan komitmen untuk melakukan perbaikan dan siap mengikuti pendampingan berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Pada tanggal 7 Agustus 2025 Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melanjutkan kegiatan pemantauan dan pembinaan ke Kabupaten Lombok Tengah. Tim melakukan kunjungan ke 25 lembaga yang terdiri atas sekolah, lembaga swasta, dan organisasi perangkat daerah untuk menilai penggunaan bahasa Indonesia di papan nama, dokumen administrasi, serta berbagai media komunikasi resmi. Kegiatan ini diawali dengan audiensi antara Kepala Balai Bahasa dan Sekretaris Daerah Lombok Tengah yang memberikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan pengutamaan bahasa negara. Dari hasil pemantauan, tim menemukan berbagai bentuk penyimpangan penggunaan bahasa, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui sosialisasi kolektif di tingkat kabupaten sebagai upaya pembinaan secara terstruktur dan menyeluruh.

Pada tanggal 20 Agustus 2025 Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Sosialisasi dan Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Tata Naskah Dinas yang bertempat di Ruang Rapat Bupati Lombok Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang mewakili sembilan lembaga pemerintah, empat belas lembaga pendidikan, dan dua lembaga swasta. Materi kegiatan difokuskan pada pemahaman regulasi terbaru terkait penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, termasuk penamaan ruang, papan informasi, dan dokumen resmi lembaga. Peserta juga diberikan bimbingan teknis mengenai tata naskah dinas sesuai dengan ejaan dan aturan yang berlaku. Pada akhir kegiatan, seluruh peserta menyatakan komitmen bersama untuk menerapkan penggunaan bahasa Indonesia di lembaga masing-masing, dengan tindak lanjut berupa pendampingan lanjutan dan evaluasi berkala.

Pada tanggal 24 September 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB melanjutkan kegiatan pendampingan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara untuk Sekolah Nasional 3 Bahasa Budi Luhur di Kota Mataram. Dalam kegiatan yang merupakan hari kedua pendampingan ini, tim Balai Bahasa menggunakan metode intensif dengan fokus utama pada tata naskah dinas sebagai bagian integral dari penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam konteks kelembagaan. Sejumlah 17 orang yang terdiri atas staf administrasi dan guru bahasa hadir sebagai peserta. Kepala sekolah — Wahyu Kasidi — menyampaikan bahwa meskipun sekolah tersebut berpredikat “sekolah bahasa”, masih terdapat aspek penggunaan bahasa Indonesia yang belum konsisten, terutama pada dokumen resmi dan surat dinas. Oleh karena itu, mereka berharap pendampingan ini tidak berhenti satu kali saja, melainkan berlangsung dalam intensitas yang memungkinkan pembaruan penggunaan bahasa yang lebih menyeluruh.

Dalam sesi pendampingan, tim penyuluh bahasa — termasuk Toni Samsul Hidayat dari Balai Bahasa NTB — memaparkan regulasi mengenai pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan tata naskah, menjelaskan bagaimana memasang teks bahasa Indonesia berdampingan dengan bahasa asing, serta mempraktikkan perbaikan langsung pada tiga contoh surat dinas milik sekolah. Peserta diminta memegang kertas koreksi dan melakukan revisi bersama dalam bentuk perbaikan struktur kalimat, penggunaan tanda baca, kop surat, dan isi surat. Beberapa pertanyaan muncul, terutama mengenai penggunaan tanda titik dua, struktur kalimat efektif, dan pemilihan kata yang tepat. Pendampingan ini menunjukkan bahwa pendekatan praktik langsung—dengan revisi langsung dokumen peserta—dipakai sebagai strategi untuk memperkuat kompetensi kebahasaan dalam lembaga.

Pada tanggal 15 September 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB melakukan pendampingan lembaga yang sebelumnya telah mengikuti pembinaan terkait pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan tata naskah dinas. Sasaran pendampingan mencakup instansi pemerintah, sekolah, dan lembaga swasta yang



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

dibina sejak kegiatan sosialisasi sebelumnya pada 20 Agustus 2025. Dalam tahap ini, tim menyebar ke beberapa institusi, antara lain SMAN 1 Jonggat, MAN 2 Lombok Tengah, MTsN 2 Lombok Tengah, serta OPD seperti Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi, Dinas Pariwisata, dan Dinas Koperasi serta instansi terkait lainnya. Tujuannya adalah meninjau secara langsung perubahan yang telah dilakukan oleh masing-masing lembaga dalam penggunaan bahasa Indonesia—khususnya pada tata naskah dinas—dan memberikan rekomendasi pembenahan.

Beberapa lembaga disebut masih dalam tahap perencanaan perubahan dokumen, karena mereka perlu mengalokasikan anggaran dan menyusun petunjuk internal untuk penerapan. Misalnya, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lombok Tengah menyatakan bahwa lembaganya berkoordinasi dengan bagian organisasi dan tata laksana untuk menyamakan format naskah dinas yang baku di seluruh lini instansi. Di sekolah-sekolah seperti SMAN 1 Jonggat dan MTsN 2, tim pendamping mencatat bahwa sudah ada upaya pembenahan struktur naskah dinas berdasarkan rekomendasi pembinaan sebelumnya, dan lembaga-lembaga tersebut telah mengonsultasikan perubahan kepada tim Balai Bahasa.

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kegiatan pada IKK ini sebagai berikut.

1. Tingkat kesiapan lembaga yang beragam, di mana sebagian sekolah dan OPD telah mulai melakukan perbaikan tata naskah dinas, sedangkan lembaga lain masih dalam tahap awal sehingga hasil perubahan belum dapat terlihat nyata.
2. Keterbatasan sumber daya manusia di lembaga sasaran, khususnya pada unit administrasi, membuat proses penerapan kaidah bahasa Indonesia dalam surat dinas berjalan lambat karena hanya ditangani oleh sedikit staf.
3. Keterbatasan anggaran lembaga, terutama di instansi daerah, untuk mencetak ulang dokumen atau memperbarui papan nama dan papan informasi sesuai standar bahasa Indonesia yang benar.
4. Pengaruh kebiasaan penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah yang masih kuat pada penamaan ruang, kegiatan, maupun dokumen internal, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk mengubah pola pikir dan praktik berbahasa.
5. Keterbatasan waktu pendampingan langsung yang hanya dapat dilakukan beberapa kali per tahun membuat monitoring terhadap progres lembaga belum sepenuhnya intensif.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian kegiatan dalam IKK ini sebagai berikut.

1. Melakukan pendampingan berbasis praktik dengan membawa contoh dokumen nyata milik lembaga untuk diperbaiki langsung bersama peserta, sehingga hasil dapat segera diaplikasikan dan dipahami.
2. Memberikan rekomendasi tertulis dan panduan standar berupa contoh tata naskah dinas dan format papan nama sesuai kaidah bahasa Indonesia, sehingga lembaga memiliki rujukan yang dapat digunakan secara berkelanjutan.
3. Mengintegrasikan pendampingan dengan program peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia, seperti mendorong staf administrasi dan guru untuk mengikuti kegiatan PKBI agar pemahaman mereka lebih mendalam.
4. Menjalin koordinasi dengan pejabat struktural daerah (sekretaris daerah, kepala dinas, kepala sekolah) untuk memastikan bahwa komitmen penggunaan bahasa Indonesia dimasukkan dalam kebijakan internal lembaga.
5. Memberikan penguatan motivasi kepada peserta melalui pemaparan manfaat jangka panjang dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dari sisi tata kelola administrasi, citra kelembagaan, maupun kepatuhan terhadap regulasi nasional.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya

Progress/Kegiatan

Pada triwulan 3, kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian IKK Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya adalah Pemberdayaan dan Pendampingan Komunitas Penggerak Literasi di Kabupaten Lombok Utara. Pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2025 Balai Bahasa Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan dan Pendampingan Komunitas Penggerak Literasi yang bertempat di Cafe Bale Hao, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini menghadirkan sekitar 100 peserta, yang terdiri pihak sekolah penerima buku Gerakan Literasi Nasional (GLN), pendamping satuan pendidikan, komunitas literasi, media massa, dan duta bahasa. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara, H. Adenan, yang menyampaikan apresiasi terhadap peran Balai Bahasa Provinsi NTB dalam memfasilitasi peningkatan literasi di daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Balai Bahasa NTB, Dwi Pratiwi, menyampaikan bahwa sejak 2022 sekolah-sekolah penerima buku GLN di Kabupaten Lombok Utara belum secara konsisten memanfaatkan koleksi buku tersebut. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang sebagai wadah dialog dan pendampingan agar sekolah, komunitas, dan media lokal dapat bersama memaksimalkan penggunaan buku dan media literasi tersebut. Dalam pelaksanaan, lima narasumber berperan aktif: Dwi Pratiwi memberikan arahan kebijakan pengembangan dan pembinaan bahasa, Zamzam Hariro mengampu materi tentang pemahaman membaca, Edwin berbagi keahlian memilih buku sesuai jenjang serta pengenalan tingkat baca anak, Dewa Ketut Sudana memimpin sesi membaca nyaring, sementara Muzayin membahas strategi pengembangan minat baca di sekolah. Para peserta diajak berdiskusi dan melakukan studi kasus tentang hambatan implementasi literasi di sekolah dan komunitas masing-masing, serta merancang langkah tindak lanjut yang realistis dengan sumber daya lokal. Kegiatan tiga hari itu tidak hanya bersifat teoritis: sesi praktik langsung dan pendampingan per kelompok memungkinkan peserta menerapkan teknik membaca nyaring, memilih buku yang sesuai, dan memikirkan cara mengubah kebiasaan membaca. Selain itu, peserta juga diberi kesempatan bertukar pengalaman tentang tantangan spesifik di daerah masing-masing, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya akses buku, dan kurangnya dukungan teknis perpustakaan sekolah. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi penguatan literasi di Kabupaten Lombok Utara, menjembatani antara buku yang tersedia dan penggunaan nyata di sekolah, komunitas, dan masyarakat luas.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Pemanfaatan buku GLN yang belum optimal. Banyak sekolah penerima buku Gerakan Literasi Nasional belum menata, memanfaatkan, atau mengintegrasikan koleksi tersebut ke dalam program pembelajaran dan kegiatan literasi sekolah.
2. Keterbatasan kapasitas guru dan pendamping. Guru serta pendamping satuan pendidikan belum sepenuhnya memahami strategi memilih buku sesuai tingkat baca siswa, serta teknik membangkitkan minat baca anak.
3. Kurangnya dukungan infrastruktur. Beberapa sekolah di Lombok Utara menghadapi kendala ruang baca dan fasilitas perpustakaan yang minim sehingga penggunaan buku tidak maksimal.
4. Rendahnya sinergi antar pemangku kepentingan. Kolaborasi antara sekolah, komunitas literasi, media, dan pemerintah daerah masih terbatas, sehingga upaya literasi berjalan parsial dan kurang berkelanjutan.
5. Tantangan partisipasi peserta didik. Minat baca sebagian besar siswa masih rendah, dipengaruhi faktor budaya membaca di lingkungan keluarga maupun komunitas.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Pendampingan intensif dan berjenjang. Tim Balai Bahasa Provinsi NTB menugaskan narasumber memberikan praktik langsung, seperti teknik membaca nyaring dan pemilihan buku sesuai tingkat baca, sehingga guru memiliki keterampilan aplikatif.
2. Penguatan kolaborasi lintas pihak. Melibatkan Dinas Pendidikan, komunitas literasi, media massa, dan duta bahasa untuk memperkuat jaringan penggerak literasi, agar kegiatan tidak berhenti di sekolah saja.
3. Optimalisasi buku GLN. Sekolah didorong menyusun program khusus pemanfaatan buku GLN, seperti klub membaca, pojok baca kelas, dan lomba literasi berbasis koleksi yang tersedia.
4. Peningkatan kesadaran literasi. Melalui sesi diskusi dan berbagi pengalaman, peserta diarahkan menyusun rencana tindak lanjut yang sesuai dengan konteks sekolah dan komunitas masing-masing.
5. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Tim merancang sistem pelaporan pemanfaatan buku dan tindak lanjut pasca-kegiatan, sehingga progres literasi dapat dipantau secara periodik.

[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan 3 ini, tahapan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung IKK Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra Tervalidasi adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 7 Juli 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB menyelenggarakan Lokakarya Kosakata Bahasa Daerah Sasak di Mataram sebagai bagian dari upaya inventarisasi kosakata daerah. Kegiatan ini merupakan forum teknis untuk menyaring, memverifikasi, dan menyunting hasil kosakata bahasa Sasak yang telah terkumpul. Peserta terdiri atas pakar bahasa daerah, penyuluh, dan tim internal Balai Bahasa. Dalam lokakarya tersebut dibahas kosakata eksis yang berkaitan dengan budaya lokal—baik nomina maupun verba—dengan tujuan menghasilkan daftar kosakata terverifikasi yang kemudian diajukan dalam sidang komisi bahasa daerah. Keluaran kegiatan ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kamus bahasa daerah Sasak, serta sebagai usulan kosa kata daerah yang dapat dipertimbangkan masuk ke dalam basis data bahasa nasional.
2. Selain itu, dalam pertengahan tahun 2025 Balai Bahasa NTB juga melakukan kegiatan Penyusunan Ensiklopedia Sastra Daerah. Kegiatan pengambilan data dilaksanakan selama dua hari (19–20 Agustus 2025), dengan fokus pada sastra tradisional di NTB. Tim Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional Perkamusan dan Peristilahan ditugaskan menggali informasi dari para sastrawan aktif, penulis, dan pegiat sastra lokal di Kota Mataram, serta melakukan studi kepustakaan di Museum Daerah dan Perpustakaan. Hasil yang diharapkan meliputi penambahan entri tokoh sastra, karya sastra, dan kronologi peristiwa sastra ke dalam ensiklopedia daerah yang terus diperbarui.
3. Pada tanggal 21 sampai dengan 22 Agustus 2025 Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD) yang berfokus pada validasi hasil inventarisasi kosakata bahasa Sasak. Kegiatan ini berlangsung di Mataram dan diikuti oleh sejumlah pakar bahasa daerah, akademisi, serta unsur perwakilan masyarakat bahasa Sasak yang memiliki kompetensi di bidang linguistik dan budaya lokal. SKBD dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari lokakarya inventarisasi kosakata yang telah dilakukan sebelumnya, dengan tujuan menguji kelayakan kosakata untuk didokumentasikan, distandardisasi, serta diusulkan sebagai bagian dari data leksikal bahasa daerah yang berpotensi masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selama dua hari pelaksanaan, tim melakukan verifikasi, pengelompokan, dan pembahasan mendalam atas kosakata yang dikumpulkan, mencakup aspek fonologi, morfologi, semantik, serta kesesuaiannya dengan kaidah pemakaian dalam masyarakat. Kegiatan ini menandai komitmen Balai Bahasa NTB dalam mendukung upaya perlindungan dan pelestarian bahasa Sasak melalui mekanisme ilmiah yang melibatkan pemangku kepentingan terkait

Kendala/Permasalahan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Banyak kosakata bahasa Sasak yang memiliki variasi bentuk dan makna antardaerah sehingga sulit disepakati secara seragam.
2. Keterbatasan data tertulis menyebabkan tim lebih banyak mengandalkan data lisan dari narasumber, yang membutuhkan validasi lebih lanjut.
3. Keterbatasan waktu menyebabkan proses penyaringan dan verifikasi kosakata belum dapat menampung seluruh masukan secara mendalam.
4. Data tokoh sastra dan karya sastra daerah masih tersebar, sebagian belum terdokumentasi dengan baik dalam arsip tertulis.
5. Kurangnya sumber referensi ilmiah yang dapat mendukung pencatatan biografi tokoh sastra lokal dan kronologi karya.
6. Keterbatasan waktu dalam menjaring informasi langsung dari sastrawan aktif, komunitas, dan keluarga tokoh sastra.
7. Perbedaan pandangan antarpeserta mengenai penentuan makna, penggunaan, dan status kosakata tertentu dalam bahasa Sasak.
8. Keterbatasan jumlah kosakata yang dapat dibahas secara tuntas dalam waktu sidang dua hari.
9. Perlunya penyelarasan hasil sidang dengan kaidah leksikografi nasional agar sesuai untuk diusulkan ke dalam KBBI.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Melibatkan pakar bahasa daerah, penyuluh, dan akademisi agar proses verifikasi lebih objektif dan akuntabel.
2. Membandingkan hasil inventarisasi dengan data pustaka dan rekaman sebelumnya untuk mengurangi bias penggunaan lokal.
3. Menyusun mekanisme tindak lanjut berupa kajian mendalam pada kosakata yang masih memerlukan verifikasi tambahan.
4. Melaksanakan wawancara mendalam dengan sastrawan aktif, pegiat komunitas, dan keluarga tokoh sastra untuk memperoleh data primer.
5. Melakukan studi kepustakaan ke museum daerah, perpustakaan, dan media lokal untuk melengkapi catatan sejarah sastra.
6. Menetapkan prioritas entri berdasarkan urgensi perlindungan dan tingkat keterancaman dokumentasi karya sastra daerah.
7. Mengedepankan musyawarah dalam penentuan kesepakatan kosakata dengan merujuk pada data linguistik yang sah.
8. Membagi kosakata ke dalam kategori prioritas sehingga kosakata penting dapat diverifikasi lebih dahulu.
9. Menyusun berita acara sidang yang terdokumentasi lengkap sebagai dasar penyampaian hasil kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Progress/Kegiatan

Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan yang mendukung [IKK 5.1] pada satuan kerja Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa pengambilan data pada lima lokasi seperti pada



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

deskripsi berikut ini.

Pada tanggal 25—28 Agustus 2025, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan Pengambilan Data Kebahasaan dalam rangka Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini merupakan tahap awal pemetaan bahasa, sastra, dan aksara di Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari pelaksanaan program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam bidang perlindungan bahasa dan sastra daerah. Dalam kegiatan ini, tim pengumpul data yang terdiri atas pegawai Balai Bahasa Provinsi NTB menginventarisasi kosakata dasar, antara lain kosakata swadesh, kosakata budaya, kosakata terkait makanan dan minuman, anggota tubuh, binatang, serta data situasi kebahasaan dan kondisi geografis daerah pengamatan.

Proses pengumpulan data di Desa Mertak melibatkan empat orang narasumber sebagai sumber utama, sehingga memungkinkan diperolehnya sekitar 1.100 kosakata yang sesuai dengan sasaran pengambilan data tahun 2025. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari Kepala Desa Mertak, Moh. Syahnan, yang dalam keterangannya menyampaikan dukungan penuh terhadap program pemetaan bahasa ini karena dinilai tepat dan penting dalam rangka menjaga identitas bangsa melalui bahasa. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi upaya pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah di Nusa Tenggara Barat serta memperkuat basis data kebahasaan yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kebijakan kebahasaan di masa mendatang.

Pada tanggal 25—28 Agustus 2025, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan Pengambilan Data Kebahasaan dalam rangka Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara di Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai bagian dari upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah. Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama empat hari, dan pada hari ketiga, tim telah berhasil mengumpulkan kurang lebih 1.100 data berupa kosakata yang mencakup kata, frasa, klausa, dan kalimat dari bahasa yang digunakan masyarakat setempat. Selain itu, tim juga diarahkan untuk mengumpulkan data sastra, meskipun keterbatasan pengetahuan sastra dari para narasumber membuat tim berencana melakukan penelusuran lebih lanjut kepada masyarakat guna menggali informasi mengenai bentuk sastra yang hidup di Desa Sambik Elen.

Kegiatan ini turut dipantau langsung oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dwi Pratiwi, pada hari pertama pengambilan data. Kehadiran Kepala Balai bertujuan melakukan evaluasi dan memberikan arahan terkait pemilihan narasumber. Hal ini karena narasumber awal yang direkomendasikan oleh Kepala Desa Sambik Elen tidak memenuhi kriteria ilmiah yang ditentukan, sebab berasal dari penutur dialek Sasak a-e yang berbeda dengan kriteria yang dipersyaratkan. Atas arahan tersebut, tim segera melakukan penyesuaian dengan memilih narasumber yang sesuai dengan syarat, yakni penutur asli bahasa setempat, tidak pernah tinggal di luar daerah lebih dari satu tahun, serta memiliki mobilitas terbatas agar bahasa yang dituturkan tidak terkontaminasi oleh pengaruh bahasa komunitas lain. Dengan pendampingan empat orang narasumber lapangan sesuai kriteria tersebut, kegiatan pengambilan data di Desa Sambik Elen dapat berjalan lebih terarah dan sesuai tujuan perlindungan serta dokumentasi bahasa daerah.

Pada tanggal 25—28 Agustus 2025, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan pengambilan data kebahasaan untuk program Peta Kebinekaan Bahasa, Aksara, dan Sastra tahap pertama di Desa Genggeling, Kabupaten Lombok Utara, setelah sebelumnya dilaksanakan di Desa Mertak, Kabupaten Lombok Tengah, dan Desa Sambik Elen, Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan diawali dengan pengumpulan data berupa profil desa, sejarah, serta folklor yang berkembang di masyarakat Sambik Elen melalui wawancara dengan narasumber utama, Supardi, yang didampingi oleh dua narasumber pendamping, yaitu Sabnur dan Tusniati, guna memastikan kelengkapan informasi mengingat usia narasumber utama yang sudah lanjut. Selanjutnya, tim melaksanakan pencatatan kosakata dan data kebahasaan lain yang menjadi ciri khas masyarakat Genggeling.

Selain data kebahasaan, tim juga mendokumentasikan khazanah kesastraan masyarakat setempat. Supardi, selaku narasumber utama, memiliki sejumlah manuskrip Sasak (*takepan*) yang ditulis di atas lontar, dan sekitar sepuluh naskah berhasil didata dalam kegiatan ini. Dokumentasi tersebut memperkaya hasil inventarisasi kebahasaan sekaligus memperlihatkan kekayaan tradisi literasi masyarakat Sasak di Desa Genggeling. Kegiatan pengambilan data ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat setempat karena mampu merekam kosakata bahasa Sasak khas Genggeling yang sudah jarang dikenal oleh generasi



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

muda, sehingga diharapkan dapat diwariskan dan dilestarikan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program jangka panjang pemetaan kebinekaan bahasa, sastra, dan aksara di NTB yang akan berlangsung hingga tahun 2029, sebagai upaya perlindungan bahasa daerah mengingat adanya kemungkinan perubahan tindak tutur dan pergeseran penduduk yang dapat memengaruhi peta kebahasaan yang telah tersusun.

Pada tanggal 18–21 September 2025 Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan pengambilan data kebahasaan dalam rangka Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Tim yang beranggotakan empat orang melakukan wawancara awal dengan Kepala Desa Buwun Mas, Rochidi, yang memberikan informasi mengenai kondisi demografis desa, profesi mayoritas masyarakat, data pendidikan, serta gambaran umum kebahasaan setempat. Berdasarkan data desa, mayoritas warga bekerja sebagai nelayan dan petani dengan tingkat mobilitas rendah, meskipun banyak pendatang dari daerah lain bermukim di wilayah tersebut. Tim kemudian diarahkan untuk mewawancarai Ketua Adat, Lalu Gunawan atau Mamiq Gunawan, yang memaparkan sejarah desa, asal-usul penamaan Buwun Mas, serta kekhasan penggunaan bahasa Sasak di desa tersebut.

Selanjutnya, tim menjadikan Kepala Dusun Belongas, Nursin, sebagai narasumber utama untuk merekam 200 kosakata Swadesh dengan dialek Belongas. Hasil pengamatan menunjukkan adanya penggunaan bunyi glotal dengan frekuensi cukup tinggi, tidak hanya pada posisi akhir kata, tetapi juga pada posisi tengah kata, misalnya pada kata *da?un* (daun), *be?en* (beri), dan *u?ujan* (hujan). Pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan pencatatan kosakata pada berbagai ranah budaya dasar, seperti bagian tubuh, kata ganti, sapaan, sistem kekerabatan, kehidupan desa, rumah dan bagian-bagiannya, peralatan dan perlengkapan, serta makanan dan minuman. Selain kosakata, tim juga mengumpulkan sejumlah kalimat simpleks sebagai bagian dari data kebahasaan yang akan dianalisis lebih lanjut. Kegiatan ini menghasilkan dokumentasi kebahasaan yang kaya, sekaligus memperlihatkan variasi dialektal bahasa Sasak di wilayah Lombok Barat sebagai bahan penting bagi penyusunan peta kebinekaan bahasa dan perlindungan bahasa daerah.

Pada tanggal 19--22 September 2025 Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan tahap kedua kegiatan pengambilan data kebahasaan dalam program Peta Kebinekaan Bahasa, Aksara, dan Sastra yang berlokasi di Desa Dadap, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Pemetaan Bahasa melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa Dadap, Rohani, serta sesepuh desa Amaq Sahnim yang didampingi oleh fasilitator komunikasi, Jaelani dan Maryati, guna menggali informasi terkait profil desa, sejarah, tradisi lisan, dan kosakata lokal. Selama pelaksanaan, sejumlah warga turut serta memberikan kesaksian dan kosakata tambahan secara spontan, sehingga memperkaya hasil inventarisasi. Tim juga melakukan perbandingan kosakata dengan data Desa Belanting yang pernah didokumentasikan pada tahun 1997, dan ditemukan adanya perbedaan kosakata akibat faktor migrasi penduduk yang memengaruhi perkembangan bahasa di wilayah tersebut. Melalui kegiatan ini Balai Bahasa Provinsi NTB memperoleh data empiris yang valid mengenai variasi kosakata antarwilayah, yang selanjutnya menjadi bahan penting dalam penyusunan peta kebinekaan bahasa sebagai upaya perlindungan dan pelestarian bahasa daerah di Nusa Tenggara Barat.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Di Desa Mertak, kendala yang muncul antara lain kesulitan narasumber dalam menjelaskan kosa kata budaya akibat adanya pergeseran istilah serta keterbatasan akses menuju lokasi yang cukup jauh dari pusat kota.
2. Di Desa Sambik Elen, tantangan utama yang dihadapi ialah ketidaksesuaian narasumber awal dengan kriteria penutur asli serta keterbatasan pengetahuan narasumber terhadap sastra daerah.
3. Di Desa Genggelang, tim menghadapi hambatan berupa narasumber utama yang sudah lanjut usia sehingga kurang memahami sebagian kosakata, serta kondisi manuskrip Sasak (takepan) yang mulai rusak.
4. Di Desa Buwun Mas, kendala yang menonjol adalah keunikan dialek lokal yang terdengar janggal



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

dibandingkan dialek Sasak lain serta keterbatasan jumlah penutur asli yang hanya terdapat di dua dusun.

5. Di Desa Dadap, percampuran bahasa akibat pengaruh bahasa luar dan keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap istilah budaya tradisional menjadi hambatan utama dalam pengumpulan data.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Di Desa Mertak, pendalaman wawancara dengan pendekatan kontekstual serta koordinasi dengan aparat desa menjadi solusi utama.
2. Di Desa Sambik Elen, tim melakukan seleksi ulang narasumber dengan arahan Kepala Balai serta melakukan penelusuran lapangan tambahan untuk data sastra.
3. Di Desa Genggeling, keberadaan narasumber pendamping dimanfaatkan untuk melengkapi keterbatasan narasumber utama, sementara manuskrip Sasak didokumentasikan secara digital untuk menjaga keaslian data.
4. Strategi di Desa Buwun Mas difokuskan pada pencatatan fonetis secara detail, termasuk fenomena bunyi glotal, serta memusatkan pengambilan data pada dusun dengan penutur asli.
5. Di Desa Dadap, pendekatan lintas generasi dengan melibatkan penutur tua dan muda diterapkan untuk membandingkan kosakata, disertai observasi langsung terhadap praktik budaya dengan dukungan tokoh adat.

[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan 3 Tahun 2025 ini, pelaksanaan [IKK 5.2]—Rasio Pengajar Bahasa Daerah terhadap Penutur Muda yang Terimbas berfokus pada Pemantauan dan Evaluasi Pengimbasan Revitalisasi Bahasa Daerah dan pelaksanaan Festival Tunas Bahas Ibu di tingkat kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan lima kabupaten/kota dipulau Lombok dengan mengunjungi satu SD, satu SMP, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing.

Pada 21 Juli 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pengimbasan Revitalisasi Bahasa Daerah di Kabupaten Lombok Timur sebagai lokasi perdana. Tim yang terdiri atas Kepala Balai Bahasa NTB, Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Adi Budiwiyanto, Kepala Bidang Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, melakukan kunjungan ke SDN 3 Semaya, SMPN 1 Selong, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan berjalan baik meskipun muncul kendala anggaran sebagaimana disampaikan Ketua KKG Kecamatan Sikur, Tawakkal. Menanggapi hal itu, Adi Budiwiyanto menegaskan pembagian tanggung jawab pendanaan antara pusat dan daerah, sementara Kepala Balai Bahasa NTB, Dwi Pratiwi, menambahkan bahwa kesepahaman dengan dinas pendidikan kabupaten/kota sudah dicapai dan tengah disiapkan nota kesepahaman untuk ditandatangani kepala daerah dan gubernur. Pemantauan ini berhasil memperoleh data berupa kuesioner siswa, guru, kepala sekolah, dan guru master, serta dokumentasi pembelajaran dan praktik siswa yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program. Kegiatan tersebut menandai dimulainya rangkaian pemantauan dan evaluasi di Pulau Lombok yang akan menyasar lima kabupaten/kota, dengan Lombok Tengah sebagai tujuan berikutnya pada hari kedua.

Pada 22 Juli 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB melaksanakan hari kedua kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengimbasan Revitalisasi Bahasa Daerah di Kabupaten Lombok Tengah dengan lokasi pemantauan di SDN 1 Sangkawana, SMPN 3 Jonggat, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini juga didampingi oleh Adi Budiwiyanto, Kepala Bidang Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Di SDN 1 Sangkawana, proses pengimbasan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

berjalan baik dengan antusiasme tinggi dari pihak sekolah. Kepala sekolah, Muhammad Paesal, menyampaikan bahwa pengimbasan bahasa daerah semakin gencar dilakukan untuk menyongsong pelaksanaan FTBI tingkat kecamatan. Sementara itu, di SMPN 3 Jonggat, pengimbasan belum maksimal karena adanya kendala perbedaan dialek. Guru master Jamilatun Hilmiah, yang berasal dari Lombok Timur, terpaksa menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran karena siswa tidak memahami bahasa Sasak dialek e-e. Kunjungan berlanjut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah yang diterima oleh Sekretaris Dinas, Lalu Moh. Hilmi. Ia menyampaikan bahwa selain FTBI, pihaknya tengah menyusun modul ajar bahasa daerah berbasis dialek a-e untuk mendukung pelestarian bahasa Sasak yang digunakan di Lombok Tengah. Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB, Dwi Pratiwi, mengapresiasi inisiatif ini dan menegaskan bahwa program Revitalisasi Bahasa Daerah tidak membatasi penggunaan dialek tertentu, melainkan memberikan keleluasaan bagi setiap wilayah untuk memilih dialek sesuai dengan konteks lokalnya.

Pada 23 Juli 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB melaksanakan hari ketiga kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengimbasan Revitalisasi Bahasa Daerah di Kabupaten Lombok Utara dengan lokasi pemantauan di SDN 3 Gondang, SMPN 2 Tanjung, serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa proses pengimbasan belum berjalan baik. Di SDN 3 Gondang, siswa tidak diajarkan bahasa Sasak dan praktik pembelajaran masih menggunakan bahasa Indonesia. Guru master pun dinilai belum memahami dengan baik materi pengimbasan. Kondisi yang lebih memprihatinkan ditemukan di SMPN 2 Tanjung karena guru master yang seharusnya bertugas belum melakukan pengimbasan sama sekali. Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB, Dwi Pratiwi, bersama Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, menyampaikan hasil temuan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara, Adenan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Balai Bahasa menekankan pentingnya pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah di SD dan SMP mengingat Lombok Utara memiliki kekayaan budaya dan banyak sastrawan yang berkembang di daerah tersebut.

Pada 24 Juli 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB melaksanakan hari keempat kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengimbasan Revitalisasi Bahasa Daerah dengan menyasar SDN 1 Sandik dan SMPN 2 Gerung di Kabupaten Lombok Barat. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pengimbasan berjalan cukup baik. Di SDN 1 Sandik, sekitar 31 siswa kelas III antusias belajar bahasa Sasak melalui pembacaan puisi di depan kelas. Sementara itu, di SMPN 2 Gerung, sekitar 20 siswa kelas VIII mengikuti pembelajaran mendongeng (bewaran) dan mampu menampilkan keterampilan tersebut dengan baik. Kegiatan ini juga didukung penuh oleh pihak sekolah, termasuk Wakil Kepala SMPN 2 Gerung yang sekaligus seorang budayawan. Ia menegaskan semangat siswa dalam belajar bahasa daerah serta mendorong percepatan realisasi kurikulum muatan lokal bahasa Sasak. Setelah pemantauan, tim berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat. Walau Kepala Dinas tidak hadir, Kepala Bidang Kebudayaan menerima laporan dan menyampaikan bahwa sekolah menantikan realisasi kurikulum muatan lokal. Menanggapi hal tersebut, Imanto, Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, menyampaikan bahwa finalisasi bahan ajar muatan lokal sedang diselesaikan dan akan dilanjutkan dengan bedah buku serta distribusi ke sekolah-sekolah.

Pada 25 Juli 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB melaksanakan hari terakhir kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengimbasan Revitalisasi Bahasa Daerah di Kota Mataram dengan menyasar SDN 2 Cakranegara dan SMPN 4 Mataram sebagai sampel. Tim pemantau menemukan bahwa guru master di kedua sekolah, yakni Yuyun Apriana (SDN 2 Cakranegara) dan Muhammad Faisal (SMPN 4 Mataram), masih menghadapi kendala dalam mengimbasan materi bahasa daerah. Pengimbasan baru dilakukan secara terbatas karena belum memiliki rancangan yang matang. Kepala sekolah memberikan dukungan, namun pelaksanaan belum optimal. Dari hasil pemantauan, Kepala Balai Bahasa NTB, Dwi Pratiwi, menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Mataram bahwa sekolah dan tenaga pendidik sebenarnya sudah siap, tetapi mereka masih membutuhkan landasan hukum berupa peraturan wali kota (perwali) dan kurikulum muatan lokal bahasa Sasak sebagai pijakan. Pemantauan ini menutup rangkaian kegiatan evaluasi di Pulau Lombok, dan hasilnya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pelindungan bahasa daerah ke depan.

Pada 22 September 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB menghadiri Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan di Aula Handayani, KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini menghadirkan tujuh mata lomba, yaitu *Pidarte*, *Bewaran*, *Begolohan*, *Menulis Cekon (cerita konteq)*, *Nembang Sasak*, *Membaca Puisi Sasak*, dan *Menulis Aksara Sasak* dengan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

jumlah peserta sebanyak 242 siswa SD dan 164 siswa SMP. Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB, Dwi Pratiwi, hadir bersama Kasman (Widyabasa Ahli Muda) dan Wahyudi untuk memberikan dukungan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Kepala Balai Bahasa menyampaikan apresiasi atas antusiasme panitia, peserta, dan masyarakat Lombok Timur serta menegaskan bahwa lomba bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa dan sastra daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Revitalisasi Bahasa Daerah yang digagas pemerintah pusat sebagai bentuk dorongan kepada pemerintah daerah agar melestarikan, membina, dan mengembangkan bahasa daerah. Balai Bahasa NTB menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga bahasa daerah di Provinsi NTB dapat terus terjaga sebagai aset bangsa yang sangat berharga.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan pemahaman guru master dalam mengimbaskan materi bahasa daerah sehingga pelaksanaan pengajaran belum seragam dan maksimal di setiap sekolah.
2. Belum adanya landasan hukum dan kurikulum muatan lokal yang kuat di beberapa kabupaten/kota sehingga proses pembelajaran bahasa daerah tidak memiliki pijakan formal.
3. Perbedaan dialek dan keterbatasan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik daerah menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran.
4. Keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah untuk mendukung program pengimbasan dan penyelenggaraan kegiatan lanjutan, sehingga pelaksanaan lebih banyak bergantung pada inisiatif guru.
5. Kurangnya antusiasme sebagian sekolah dan tenaga pendidik, khususnya di daerah yang proses pengimbasannya belum berjalan optimal, sehingga target pemerataan pembelajaran belum tercapai.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pendampingan intensif bagi guru master melalui pelatihan lanjutan, evaluasi berkala, dan penguatan kapasitas agar dapat mengimbaskan materi dengan baik.
2. Mendorong percepatan penyusunan kurikulum muatan lokal dan regulasi daerah (perwali/perda) yang menjadi landasan hukum pembelajaran bahasa daerah di sekolah.
3. Menyusun dan mendistribusikan bahan ajar standar berbasis dialek lokal, termasuk modul ajar, panduan pembelajaran, dan media kreatif agar sesuai dengan kebutuhan daerah.
4. Mengoptimalkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan, sehingga program revitalisasi bahasa daerah berjalan lebih konsisten.
5. Mengintegrasikan kegiatan seperti FTBI sebagai sarana motivasi dan apresiasi bagi siswa, guru, dan sekolah sehingga semangat pelestarian bahasa daerah terus meningkat di kalangan generasi muda.

[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA

[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)

Progress/Kegiatan

Progres capaian output yang mendukung IKK [IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri) pada triwulan tiga ini adalah 8 lembaga BIPA (Pondok pesantren Dea Malela, Suka Bahasa Private Learning, Sekolah Nusa Alam, Mataram Lingua Franca, Mandalika Intercultural School, dan Desa Bilebante, Desa Sembalun, dan Klub Baca



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Perempuan). Tim Kerja BIPA Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan kegiatan Mandalika BUMI dan Program Penyegaran BIPA 2025.

1. Pada tanggal 8 Juli 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB melaksanakan kegiatan program Mandalika Bumi (BIPA untuk Masyarakat Inovatif) di Desa Wisata Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Program ini dirancang sebagai upaya memperkuat kemampuan komunikasi masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan wisatawan asing. Tidak hanya menasar pengajaran bahasa Indonesia kepada penutur asing, kegiatan ini juga memberikan pendampingan kepada masyarakat agar lebih percaya diri dan mampu menyampaikan informasi tentang produk wisata, adat istiadat, serta potensi daerah secara jelas dan terarah. Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB, Dwi Pratiwi, menjelaskan bahwa program Mandalika Bumi merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata untuk mendukung kelancaran komunikasi antara warga dan wisatawan. Masyarakat Desa Sembalun menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain kesulitan dalam menjelaskan harga, jenis wisata, serta budaya setempat, termasuk ajakan agar wisatawan mematuhi tata cara berpakaian tradisional. Untuk menjawab tantangan tersebut, materi pembelajaran yang diberikan disesuaikan dengan potensi lokal, seperti wisata tenun, rumah adat, taman bunga, serta kawasan persawahan dan perbukitan. Melalui pendekatan berbasis konteks lokal ini, program Mandalika Bumi diharapkan dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi masyarakat, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai tuan rumah yang ramah, informatif, dan komunikatif bagi wisatawan di NTB.
2. Pada tanggal 9 Juli 2025 Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menasar komunitas lokal sebagai bagian dari program BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) melalui kegiatan pendampingan di Desa Wisata di Lombok Utara. Acara ini diselenggarakan bersama Klub Baca Perempuan dan komunitas lokal lainnya, dengan tujuan memperkuat kapasitas komunikasi masyarakat dengan wisatawan asing melalui bahasa Indonesia yang sederhana dan efektif. Kepala Balai Bahasa NTB, Dwi Pratiwi, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan komunitas serta menekankan bahwa kemampuan berbahasa Indonesia bagi masyarakat lokal membantu mempertahankan identitas budaya sekaligus memudahkan interaksi dengan pengunjung luar. Dalam kegiatan tersebut diselenggarakan diskusi kelompok dan sesi dialog interaktif antar peserta yang terdiri dari komunitas literasi, pemuda, dan pelaku wisata. Para peserta berbagi pengalaman kebutuhan komunikasi di lingkungan mereka, misalnya di lokasi wisata, dengan merancang kosakata sederhana yang dapat digunakan oleh wisatawan asing. Selain itu, narasumber menekankan pentingnya menyediakan informasi publik (seperti papan petunjuk atau brosur) dalam bahasa Indonesia sederhana agar lebih mudah diakses oleh wisatawan. Kegiatan ini memperlihatkan sinergi antara pelestarian bahasa lokal dan upaya penginternasionalan komunikasi masyarakat lokal di Provinsi NTB.
3. Pada tanggal 22 September 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB melaksanakan Program Penyegaran BIPA: Lomba Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Penutur Asing Tahun 2025 di Kota Mataram. Kegiatan ini merupakan bagian dari program fasilitasi ke-BIPA-an yang bertujuan mendukung pemerolehan bahasa Indonesia secara aktif, kreatif, dan komunikatif, sekaligus menjadi sarana strategis diplomasi budaya. Lomba diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri atas pemelajar dan pengajar BIPA dari berbagai kabupaten/kota di NTB, dengan empat jenis mata lomba, yaitu Berpidato, Berpuisi, Bercerita, dan Bernyanyi. Para peserta lomba didampingi pengajar BIPA masing-masing, dan setiap cabang lomba menetapkan enam kategori pemenang. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Iwa Lukmana, yang menyampaikan apresiasi kepada para pemelajar, pengajar, dan pegiat BIPA atas dedikasi mereka dalam mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia. Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB, Dwi Pratiwi, juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan bagi pemelajar BIPA untuk meningkatkan kompetensi berbahasa sekaligus memperdalam pemahaman terhadap sastra dan budaya Indonesia. Melalui lomba yang menggali kreativitas, keberanian, dan penguasaan bahasa ini, para peserta tidak hanya berlatih keterampilan berbahasa, tetapi juga memperkaya pengetahuan tentang nilai budaya dan kearifan lokal Nusa Tenggara Barat, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan yang lebih mendalam terhadap bahasa Indonesia.

Kendala/Permasalahan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan kemampuan masyarakat lokal dalam berkomunikasi dengan wisatawan asing, khususnya terkait istilah wisata, budaya, dan harga produk lokal.
2. Kurangnya rasa percaya diri masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa asing ketika berinteraksi dengan wisatawan.
3. Perbedaan latar belakang peserta BIPA (pemelajar asing dan masyarakat lokal) menyebabkan tingkat pemahaman yang tidak merata.
4. Terbatasnya bahan ajar kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan lokal, terutama terkait adat, budaya, dan produk wisata daerah.
5. Keterbatasan partisipasi dan pendampingan berkelanjutan, sehingga hasil kegiatan belum optimal dalam jangka panjang.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Menyediakan materi ajar berbasis konteks lokal (wisata, budaya, adat istiadat) agar lebih mudah dipahami dan relevan.
2. Mengadakan pendampingan rutin bagi masyarakat dan pemelajar BIPA untuk meningkatkan keberlanjutan program.
3. Meningkatkan pelatihan komunikasi praktis melalui simulasi percakapan langsung dengan wisatawan atau pemelajar asing.
4. Melibatkan pengajar BIPA dan mitra relawan secara lebih intensif agar pembelajaran lebih variatif dan interaktif.
5. Mengintegrasikan program BIPA dengan event budaya dan pariwisata lokal sehingga praktik bahasa dapat langsung diterapkan di lapangan.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat

[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan 3 Tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat capaian nilai dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar **97,07**.. Capaian ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, yang dinilai melalui tiga aspek utama: kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dari aspek-aspek tersebut, Balai Bahasa NTB memperoleh nilai Sangat Baik (99,99) pada kualitas pelaksanaan anggaran, nilai Baik (91,95) pada Kualitas Perencanaan dan nilai Sangat Baik (97,98) pada kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Untuk mempertahankan dan menaikkan nilai capaian, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat harus menguatkan komitmen tim dalam menjaga akurasi perencanaan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan. Deviasi halaman III DIPA masih terjadi sehingga diperlukan strategi pencapaian target yang terstruktur sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati bersama. Tim Perencanaan sangat diharapkan mampu memanfaatkan periode revisi Halaman III DIPA untuk menyesuaikan dan menyusun kembali target pada triwulan berikutnya.

Secara kuantitatif, total realisasi anggaran pada Triwulan 3 mencapai Rp6.554.669.910 atau **62,36%** dari total pagu sebesar Rp10.510.432.000. Realisasi ini terdiri atas 69,23% untuk Belanja Pegawai (Rp1.730.814.001 dari pagu Rp2.500.000.000) dan 35,99% untuk Belanja Barang (Rp4.823.855.909 dari pagu Rp8.010.432.000). Realisasi anggaran Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sesungguhnya sudah sesuai dengan target karena sampai priode triwulan 3 ini masih terdapat blokir pagu sebesar Rp1.506.054.000,00. Balai Bahasa NTB tetap menjaga akuntabilitas dan ketepatan waktu dalam pelaporan, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan adaptif.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Deviasi Halaman III DIPA masih terjadi sehingga target kegiatan tidak sepenuhnya sejalan dengan perencanaan awal.
2. Akurasi perencanaan belum optimal, terlihat dari perbedaan capaian pada aspek perencanaan dibandingkan dengan pelaksanaan dan hasil.
3. Realisasi belanja barang masih relatif rendah (35,99%) dibanding belanja pegawai, sehingga dapat memengaruhi output program.
4. Adanya blokir pagu anggaran sebesar Rp1,5 miliar, yang berpotensi menunda realisasi penuh.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Penguatan koordinasi tim perencanaan untuk lebih cermat dalam menyusun rencana, sekaligus memanfaatkan periode revisi Halaman III DIPA secara optimal.
2. Penyusunan jadwal dan target kinerja terstruktur agar pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan meminimalkan deviasi.
3. Optimalisasi belanja barang dengan mempercepat proses pengadaan dan memastikan kegiatan yang membutuhkan belanja barang terealisasi tepat waktu.
4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran dan output, untuk memastikan kendala segera diatasi sebelum masuk triwulan berikutnya.
5. Menjaga akuntabilitas dan ketepatan laporan keuangan sebagai wujud tata kelola yang transparan dan untuk mempertahankan nilai IKPA.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat

[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat minimal A

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan 3 Tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan komitmen kuat terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui kegiatan utama, yaitu 1) perencanaan anggaran dan kinerja, dan 2) evaluasi pelaksanaan program dan anggaran. Dua kegiatan utama ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mempertahankan predikat akuntabilitas minimal A sesuai indikator kinerja [IKK 7.2]. Kegiatan Perencanaan pada periode ini adalah menindaklanjuti surat dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tertanggal 11 September 2025 mengenai revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2025, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan seluruh proses yang diminta secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Revisi yang dilakukan adalah pergeseran akun (51) Belanja Pegawai ke satuan kerja lain karena menurut perhitungan, Balai Bahasa Provinsi NTB memiliki potensi kelebihan pagu 51 sebesar Rp197.299.000,00. Koordinasi internal dilakukan untuk memastikan kesesuaian data pada dokumen DIPA dan RKAKL, serta penyesuaian terhadap perubahan regulasi dari Kementerian Keuangan. Pengunggahan dokumen revisi melalui sistem APIP telah diselesaikan sebelum batas waktu 13 September 2025, dengan dukungan penuh dari tim sekretariat dan unit terkait. Pemenuhan proses revisi anggaran ini mencerminkan komitmen Balai Bahasa Provinsi NTB terhadap akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan nasional. Seluruh tahapan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan koordinasi lintas fungsi, guna memastikan bahwa alokasi anggaran mendukung capaian kinerja yang terukur dan relevan dengan prioritas program. Dokumentasi dan pelaporan telah disusun secara sistematis sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola dan transparansi lembaga dalam menghadapi dinamika regulasi dan kebutuhan program di tahun berjalan.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Pada tanggal 6 Agustus 2025, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Rapat Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Evaluasi Kinerja Anggaran, dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Cilinaya dan diikuti oleh pegawai Balai Bahasa NTB serta perwakilan Balai Guru, Tenaga Kependidikan, dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTB. Narasumber utama berasal dari Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kepala Balai Bahasa NTB, dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB, yang menyampaikan materi mengenai tata kelola anggaran, regulasi keuangan terbaru, dan evaluasi kinerja program. Kegiatan ini menekankan pentingnya integritas, ketelitian, dan disiplin dalam pelaporan anggaran serta pengelolaan kegiatan yang akuntabel. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 dan reformulasi IKPA 2024 menjadi pedoman utama dalam mendorong percepatan realisasi belanja, peningkatan kualitas output, serta pencegahan penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun. Seluruh satuan kerja diinstruksikan untuk konsisten memedomani dokumen perencanaan seperti DIPA, RKAKL, dan Rencana Penarikan Dana (RPD), serta melengkapi kegiatan dengan dokumen pendukung yang lengkap. Selain itu, permasalahan yang muncul seperti kelebihan pembayaran, keterlambatan penyetoran PNPB, dan pengadaan barang yang tidak sesuai akun anggaran menjadi sorotan penting. Kuasa Pengguna Anggaran dan Satuan Pengawas Internal diinstruksikan untuk melakukan pengawasan ketat agar pengelolaan anggaran 2025 berjalan akuntabel, tertib, dan berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan kebahasaan dan kesastraan di NTB. Kegiatan diakhiri dengan sosialisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan panduan pelaksanaan Asesmen Prediksi Kompetensi bagi pegawai Balai Bahasa Provinsi NTB.

Pada tanggal 1 September 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB telah melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Bulan Agustus serta Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima Triwulan III secara daring. Rapat ini diawali dengan pemaparan capaian kinerja dan daya serap anggaran oleh Antun Ariestyono, diikuti laporan rencana anggaran bulan September oleh Kepala Subbagian Umum, Diah Rachma Yudita. Seluruh ketua tim kerja menyampaikan capaian kegiatan masing-masing, termasuk identifikasi kendala pelaksanaan sebagai bagian dari pengukuran kinerja dan upaya mitigasi untuk triwulan berikutnya. Arahan Kepala Balai, Dwi Pratiwi, menekankan pentingnya dokumentasi capaian dalam bentuk dua salindia yang disimpan pada tautan Google Drive sebagai langkah strategis untuk memperkuat pelaporan kinerja berbasis data.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Ketidaksesuaian jadwal pelaporan tim kerja. Beberapa tim kerja belum menyusun laporan capaian secara sistematis atau belum mengikuti format yang diharapkan, sehingga menyulitkan konsolidasi data evaluasi.
2. Keterbatasan dokumentasi visual dan data terstruktur. Laporan capaian belum sepenuhnya didukung oleh data visual (grafik/salindia) yang memudahkan analisis dan pelaporan lintas triwulan.
3. Minimnya integrasi antara evaluasi program dan perencanaan anggaran. Hasil evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran bulan berikutnya, sehingga potensi perbaikan belum optimal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Standardisasi format laporan tim kerja. Menyusun template laporan capaian dua salindia untuk setiap tim kerja, sesuai arahan Kepala Balai, dan menyimpan dalam folder Google Drive terpusat untuk kemudahan akses dan pelaporan.
2. Penguatan dokumentasi visual dan data kinerja. Mendorong penggunaan grafik capaian, tabel daya serap, dan infografis kendala sebagai bagian dari laporan evaluasi untuk meningkatkan keterbacaan dan akurasi analisis.
3. Integrasi hasil evaluasi ke dalam perencanaan anggaran. Menetapkan mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana anggaran bulan berikutnya, dengan fokus pada kegiatan yang memiliki dampak dan efektivitas tinggi.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7569.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	Kegiatan	2	2	Rp614.370.000	Rp356.424.842	58.01
2	[DI.7569.QDC.001] Penutur bahasa terbina	Orang	275	198	Rp270.228.000	Rp168.945.950	62.52
3	[DI.7569.QDC.002] Penutur bahasa teruji	Orang	7037	4255	Rp350.000.000	Rp171.170.100	48.91
4	[DI.7569.QDC.003] Generasi muda terbina program literasi	Orang	490	500	Rp524.386.000	Rp265.234.239	50.58
5	[DI.7569.QMA.002] Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan	dokumen	0	1	Rp145.365.000	Rp74.318.576	51.13
6	[DI.7569.QMA.003] Produk Penerjemahan	dokumen	25	49	Rp1.129.554.000	Rp958.430.035	84.85
7	[DU.7566.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Kegiatan	0	0	Rp547.026.000	Rp16.184.400	2.96
8	[DU.7566.QDC.001] Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah	Orang	0	190	Rp1.235.238.000	Rp979.502.743	79.30
9	[DU.7566.QMA.002] Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra	dokumen	0	0	Rp114.870.000	Rp97.585.500	84.95
10	[DU.7567.BDB.001] Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	Lembaga	35	9	Rp166.675.000	Rp46.249.200	27.75
11	[DU.7567.BDB.002] Komunitas Penggerak Literasi Terbina	Lembaga	62	83	Rp608.000.000	Rp316.841.430	52.11



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
12	[DU.7568.QDB.001] Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	Lembaga	9	5	Rp98.296.000	Rp86.157.100	87.65
13	[WA.7613.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp4.950.000	49.50
14	[WA.7613.EBA.958] Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Dokumen	0	0	Rp216.578.000	Rp35.501.057	16.39
15	[WA.7613.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dokumen	0	0	Rp60.390.000	Rp19.005.980	31.47
16	[WA.7613.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp182.857.000	Rp116.686.607	63.81
17	[WA.7613.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp4.000.000.000	Rp2.935.350.905	73.38
18	[WA.7613.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	0	0	Rp184.071.000	Rp47.004.251	25.54
19	[WA.7613.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	1	Rp41.628.000	Rp13.056.900	31.37
20	[WA.7613.EBD.974] Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	0	0	Rp10.900.000	Rp4.522.650	41.49
Total Anggaran					Rp10.510.432.000	Rp6.713.122.465	63.87

D. Rekomendasi Pimpinan

[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

Rekomendasi:

Hitung capaian kinerja dari indikator meningkatnya kualitas literasi membaca peserta didik berdasarkan instrumen dan definisi operasional, apabila ada kendala harap berkoordinasi dengan tim kerja pusat.

[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Rekomendasi:

Tim penerjemah segera menyelesaikan produk penerjemahan berupa buku cerita yang tersisa agar dapat segera dilakukan pencetakan. Selanjutnya tetap berkoordinasi dengan tim kerja pusat tentang instrumen pemanfaatan buku produk penerjemahan. Lakukan diseminasi produk penerjemahan. Hitung capaian kinerja berdasarkan definisi operasional, apabila ada kendala berkoordinasi dengan tim kerja pusat.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya

Rekomendasi:

Hitung capaian kinerja berdasarkan instrumen dan definisi operasional sehingga akan dapat diketahui adanya peningkatan atau penurunan serta tetap melakukan koordinasi dengan tim UKBI pusat untuk memperoleh data peserta dan peuji UKBI.

[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Rekomendasi:

Tetap lakukan pendampingan kepada peserta melalui sarana komunikasi yang tersedia sehingga peserta memperoleh peningkatan kualitas berbahasanya melalui instrumen dan definisi operasional.

[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

Rekomendasi:

Tetap lakukan pendampingan terhadap lembaga, baik secara daring maupun luring sehingga dapat diketahui adanya peningkatan dari semula-menjadi, selanjutnya hitung capaian kinerja dengan cermat berdasarkan instrumen dari tim kerja pusat dan definisi operasional.

[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya

Rekomendasi:

Hitung dengan cermat capaian kinerja berdasarkan instrumen dan definisi operasional untuk mengetahui peningkatan kualitas kinerja komunitas penggerak literasi yang terdata. Lakukan pengembangan program literasi melalui inovasi Mandalika Dewisali.

[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Rekomendasi:

Lakukan koordinasi dengan tim pusat mengenai validasi produk pengembangan bahasa dan sastra serta lakukan penghitungan capaian kinerja dengan cermat berdasarkan definisi operasional. Lakukan pengembangan melalui inovasi Kamus Terpadu Sasambo.

[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Rekomendasi:

Lakukan penghitungan capaian kinerja dengan cermat berdasarkan instrumen dan definisi operasional sehingga dapat diketahui adanya penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan.

[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Rekomendasi:

Hitung dengan cermat capaian kinerja rasio pengajar bahasa daerah terhadap penutur muda yang terimbas berdasarkan instrumen dan definisi operasional.

[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)

Rekomendasi:

Hitung dengan cermat capaian kinerja lembaga penyelenggara Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang terfasilitasi terhadap jumlah lembaga BIPA yang teridentifikasi berdasarkan definisi operasional. Lakukan pengembangan program BIPA melalui inovasi Mandalika Bumi.

[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat

Rekomendasi:



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Optimalkan capaian nilai kinerja anggaran dengan berpedoman pada langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam akhir tahun anggaran dan lakukan perbaikan pada komponen IKPA yang masih bernilai rendah.

[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat minimal A
Rekomendasi:

Manfaatkan asistensi dari Biro Perencanaan dan Badan Bahasa untuk menambah informasi yang mendalam tentang Sakip sehingga dapat mencapai nilai Sakip minimal A sesuai yang tertuang dalam perjanjian kinerja.

Mataram, 7 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB

Dwi Pratiwi



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**